



RINGKASAN



PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023



R I N G K A S A N

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023

MEWUJUDKAN KEPULAUAN RIAU YANG MAKMUR,
BERDAYA SAING, DAN BERBUDAYA



R I N G K A S A N

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2023

I. CAPAIAN KINERJA MAKRO DAERAH

Capaian kinerja makro merupakan ukuran didalam penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah dengan menggunakan berbagai indikator antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan. Adapun perkembangan capaian kinerja makro daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja		Perubahan (%)
		Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Indeks Pembangunan Manusia	76,46	77,11	▲ 0,88%
2	Angka Kemiskinan	6,24%	5,69%	▼ 1,96%
3	Angka Pengangguran	8,23%	6,80%	▼ -16,95%
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,09%	5,20%	▲ 48,39%
5	Pendapatan Per Kapita	141,68	154,18	▲ 8,884%
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,342	0,340	▼ -4,13%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau, Tahun 2024

a. Indeks Pembangunan Manusia

IPM Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 adalah 77,11 dan masuk dalam kategori tinggi. Jika dibandingkan dengan IPM pada tahun 2022, IPM pada tahun 2023 mencatat peningkatan sebesar 0,65 poin atau meningkat sebesar 0,85%.

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2023

Dimensi IPM	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Harapan Hidup (AHH)	69,80	69,96	70,12	70,50	70,91
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,83	12,87	12,98	12,99	13,05
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	9,99	10,12	10,18	10,37	10,41
Pengeluaran per Kapita (PPP)	14.466	14.209	14.122	14.469	14.998
IPM Provinsi Kepulauan Riau	75,48	75,79	75,79	76,46	77,11

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024

Tidak hanya itu, IPM Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 juga tercatat melampaui IPM nasional dimana IPM Nasional pada tahun 2023 adalah sebesar 74,39 atau selisih 2,72 poin dengan Provinsi Kepulauan Riau. Jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, IPM Provinsi Kepulauan Riau bahkan menduduki urutan ke-4 tertinggi, setelah DKI Jakarta (82,46), DI Yogyakarta (81,07), dan Kalimantan Timur (78,20).

b. Angka Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan signifikan sebesar 5,69%, atau berkurang sebanyak 9,18 ribu orang jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2022 yang sebesar 6,24 persen. Terobosan menekan laju penduduk yang terdampak agar tidak masuk ke dalam kemiskinan ekstrem adalah dengan usaha pemulihan melalui beragam kebijakan maupun bantuan sosial serta asistensi ekonomi kerakyatan kepada masyarakat. Ada Empat program strategis. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan angka kemiskinan.

Pertama adalah penanganan Infrastruktur dasar berupa rehabilitasi rumah tidak layak huni, sanitasi, air bersih, dan listrik. Ditegaskannya, program ini, terus dilakukan secara kontinyu.

Kedua adalah bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Berikutnya, upaya yang akan dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil seperti Posyandu, RT/RW, Bumdes, UMKM, Perikanan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan.

Terobosan penting dibidang Pendidikan melalui program yang keempat melalui program beasiswa bagi siswa tidak mampu. Komitmen Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, program beasiswa terus berlanjut dalam dua tahun ini. Salah satu sasarannya adalah mahasiswa kurang mampu. Upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam meringankan beban rumah tangga dengan menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan serta peningkatan kapasitas ekonomi melalui pemberdayaan dan pendampingan bagi keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah.

c. Angka Pengangguran

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 mengalami perkembangan positif dibandingkan posisi tahun 2022. Dalam laman resmi BPS Provinsi Kepulauan Riau, dijabarkan bahwa TPT menunjukkan kemampuan ekonomi suatu daerah untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai TPT di suatu daerah artinya semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan di daerah tersebut. TPT Provinsi Kepulauan Riau per Agustus 2023 adalah sebesar 6,80%. TPT ini mengalami penurunan sebesar 1,43% jika dibandingkan dengan TPT per Agustus 2022, yakni sebesar 8,23%.

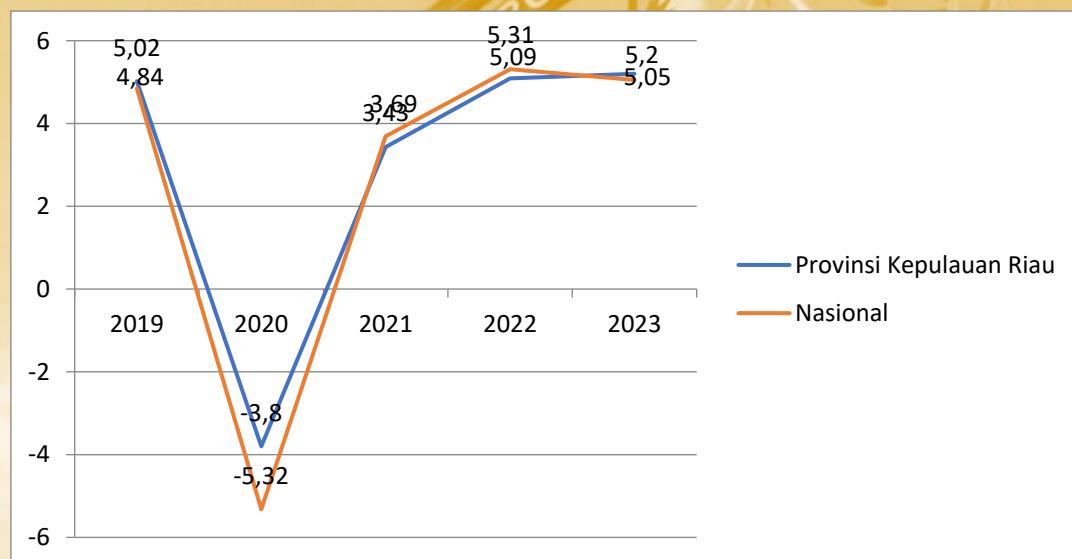
- Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.
- Pengangguran adalah (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, kelompok penduduk yang tidak aktif

mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

TPT menunjukkan kemampuan ekonomi suatu daerah untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai TPT di suatu daerah artinya semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan di daerah tersebut. TPT Provinsi Kepulauan Riau per Agustus 2023 adalah sebesar 6,80%. TPT ini mengalami penurunan sebesar 1,43% jika dibandingkan dengan TPT per Agustus 2022, yakni sebesar 8,23%.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian daerah ditinjau dari sisi laju pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau menunjukkan perkembangan dengan Bangkit (*Rebound*) ditengah kondisi gejolak ekonomi regional dan nasional. Berdasarkan capaian kinerja pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 yang dibandingkan dengan Tahun 2023, maka Provinsi Kepulauan Riau mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 0,11%. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri sebesar 5,09%, dan dibawah nilai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,31%, sementara itu, pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan di angka 5,20%.



Dalam rangka mendorong ekonomi daerah, kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 diarahkan pada Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui:

- 1) Melakukan realisasi belanja pemerintah lebih awal terutama belanja modal infrastruktur untuk menghasilkan dampak lebih optimal bagi perekonomian daerah.
- 2) Mendorong kelancaran implementasi program pemulihan ekonomi nasional di daerah.
- 3) Mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus Nongsa digital park dan KEK maintenance, repair and overhoul (MRO) Batam Aero Technic dalam rangka peningkatan realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja.
- 4) Mendorong pemulihan pariwisata dengan mendorong kesiapan penerapan protokol kesehatan CHSE pada daerah tujuan wisata tertentu, mendorong pembukaan wisata secara bertahap dan mendorong penggunaan transaksi elektronik non tunai, dan memberikan insentif kepada pelaku usaha pariwisata.
- 5) Mendorong perekonomian dan keuangan yang inklusif dengan cara: mendorong industri eksisting untuk meningkatkan pangsa penggunaan bahan baku berbasis potensi sumberdaya lokal; memprioritaskan investasi dalam pengembangan agroindustri berbasis potensi SDA di Kepri seperti hasil pertanian dan perikanan; mendorong penguatan dan kemitraan serta menjaga daya saing dan kinerja UMKM melalui digitalisasi UMKM, serta meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung (transportasi jalan, jembatan, bandara, pelabuhan) untuk menekan biaya logistik dan konektivitas.

e. Pendapatan Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam satu periode tertentu. Jumlah seluruh nilai tambah (produk) yang ditimbulkan oleh berbagai kegiatan usaha di suatu daerah (region) tanpa memperhatikan pemilik atas faktor produksi. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut.

PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 adalah sebesar Rp331.889.500,80 juta rupiah. Angka PDRB ADHB tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022, yakni sebesar Rp308.842.677,50 juta rupiah. Sementara itu, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023, adalah sebesar Rp200.043.861,44 juta rupiah, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan PDRB ADHK tahun 2022, yakni sebesar Rp 190.163.695,64 juta rupiah.

f. **Ketimpangan Pendapatan**

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan. Pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau pada 2021 dan 2022 menggunakan Indeks Rasio Gini yang dirilis oleh BPS Provinsi Kepulauan Riau. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1 dimana nilai yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Sebaliknya, Rasio Gini yang semakin mendekati nilai 0, semakin menunjukkan adanya pemerataan pendapatan. Nilai 0 pada Rasio Gini menggambarkan kesetaraan yang sempurna, artinya setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna dimana satu orang dapat memiliki semua pendapatan sementara yang lainnya tidak memiliki apapun. Indeks Rasio Gini Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 adalah sebesar 0,340. Angka ini turun sebesar 0,002 poin jika dibanding dengan Gini Ratio pada tahun 2022 yang sebesar 0,342.

Pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau menggunakan Indeks Gini yang dirilis oleh BPS Provinsi Kepulauan Riau. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1 dimana nilai yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Sebaliknya, Indeks Gini yang semakin mendekati nilai 0, semakin menunjukkan adanya pemerataan pendapatan. Nilai 0 pada Indeks Gini menggambarkan kesetaraan yang sempurna, artinya setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Indeks Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna dimana satu orang dapat memiliki semua pendapatan sementara yang lainnya tidak memiliki apapun.

Lebih lanjut, ketimpangan antar kelompok pendapatan dikatakan masuk dalam kategori ketimpangan “Rendah” bila Indeks Gini kurang dari 0,3; dikatakan ketimpangan “Sedang” bila Indeks Gini antara $0,3 - 0,4$; dan Ketimpangan “Tinggi” bila Indeks Gini di atas 0,4. Nilai Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 adalah sebesar 0,340. Nilai Indeks Gini tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan nilai Indeks Gini tahun sebelumnya, yakni sebesar 0,342. Angka

ini turun sebesar 0,002 poin jika dibanding dengan Gini Ratio pada tahun 2022, dan angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau berhasil dikendalikan oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmada dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

II. CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Keluaran (Outcome) yang merupakan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan 8 Urusan Pilihan, adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	92,29%
		Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	88,82%
2	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	1,94
		Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	94,59%
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%
		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	100%

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA
3	Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	37,16%
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	18,92%
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	100%
		Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	46,10%
		Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	0
		Rasio kemantapan jalan	80,78%
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	17,26%
		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	68,03%
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0
		Persentasi Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	20,80%
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	52,66%
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	50%
		Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	66,67%
		Persentase penanganan pra bencana	100%

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA
		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100%
1	Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	57,14%
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	2,91%
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	4.842.914
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	98,19%
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	60%
		Mengukur persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang- undangan bidang ketenagakerjaan	11,30%
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	12,63%
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	5,51
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	28,96
		Persentase cadangan pangan	17,58%
3	Pangan		

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA
4	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0
		Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100%
		Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota.	91,49
5	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	74,26
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	14,29
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	100%
		Pemanfaatan data kependudukan	41,86%
7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	10,60%
		Persentase peningkatan status desa mandiri	11,00%
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,17
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	56,88%
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	16,50%
9	Perhubungan	Rasio konektivitas Provinsi	0,60
		V/C Ratio di Jalan Provinsi	0,52
10	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	85,37%
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	88,24%
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	86,71%

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	48,57%
		Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	29,86%
12	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di provinsi	10,67%
13	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,71%
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,01%
		Peningkatan prestasi olahraga	17%
14	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%
15	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	60,31
16	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	66,43%
17	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	65,80
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	62,52
18	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban (nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	17,81%
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	27,67%
1	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	103,64%
		Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	100%

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA
2	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	101,92%
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	84,92%
		Tingkat hunian akomodasi	53,45%
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,90%
3	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	19,06
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	32,33%
4	Kehutanan	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	100%
		Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	0%
		Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	1,31%
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	100%
		Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	100%
6	Perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	-4,30%
		Persentase penanganan pengaduan konsumen	97,78%
		Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	0%
		Tertib Usaha	0%
		Persentase kinerja realisasi pupuk	88,68%
		Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	88,73%
		Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	8,06%
7	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	2,55%
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan	0%

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA
8	Transmigrasi	industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	
		Percentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	11,11%
		Percentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0%
		Percentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0%
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100%
8	Transmigrasi	-	-

Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA
1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	23,07%
		Rasio PAD	44,96
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	61,67
		Opini Laporan Keuangan	10
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3
2	Pengadaan	Percentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0%

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA
		Percentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	73,51%
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	40,57%
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	86,50%
3	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	83,35%
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	32,85%
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	57,51%
4	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	3,02
		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	19,02
		Assets management	4
		Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2,78
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>information on resources available to frontline service delivery units</i>)	96,16
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>public access to fiscal information</i>)	100

III. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah meraih opini BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 13 tahun yaitu dari tahun 2010 sampai dengan 2023. Berbagai Upaya atau strategi yang dilakukan untuk mempertahankan opini WTP yaitu meningkatkan sistem pengendalian internal (SPI), penetapan regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, Meningkatkan kapasitas aparatur penyusun laporan keuangan dan pengurus barang perangkat daerah melalui bimbingan teknis dan penyempurnaan pengelolaan barang dan pengelolaan barang yaitu aplikasi SIPD. SIPD dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik terkait perencanaan pembangunan daerah sampai pelaporan keuangan daerah.



Tindaklanjut hasil rekomendasi BPK dengan target sebesar 88% dan dapat tercapai sebesar 89,25. Hal ini dapat terwujud karena perangkat daerah kooperatif dalam menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK.

IV. REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah meliputi: 1) Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain- lain PAD yang Sah; 2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari: Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah.

Total realisasi pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2023 sebesar Rp4.170.044.095.409,31 atau 101,86% dari target pendapatan daerah dalam APBD-P sebesar Rp4.094.098.079.448,00, seperti terlihat pada Tabel berikut ini:

Kode Rek	Uraian	Target APBD-P	Realisasi	%	Lebih / (Kurang)
4	PENDAPATAN DAERAH	4.094.098.079.448,00	4.170.044.095.409,31	101,86	75.946.015.961,31
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.710.018.213.010,00	1.806.972.833.505,31	105,67	96.954.620.495,31
4.1.1	Pajak Daerah	1.545.528.271.857,00	1.631.489.164.580,00	105,56	85.960.892.723,00
4.1.2	Retribusi Daerah	17.158.831.254,00	12.203.621.186,00	71,12	(4.955.210.068,00)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.300.000.000,00	2.449.330.649,00	13,38	(15.850.669.351,00)
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	129.031.109.899,00	160.830.717.090,31	124,64	31.799.607.191,31
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.382.801.146.438,00	2.361.792.541.904,00	99,12	(21.008.604.534,00)
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.382.801.146.438,00	2.361.792.541.904,00	99,12	(21.008.604.534,00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.278.720.000,00	1.278.720.000,00	100,00	0,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	1.278.720.000,00	1.278.720.000,00	100,00	0,00

Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 sebesar Rp4.276.981.449.459,56 (96,49%) dari alokasi belanja dalam APBD-P 2023 sebesar Rp4.432.452.073.801,00.



Penjelasan lebih rinci realisasi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 masing-masing unsur Belanja Daerah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi pada Tahun 2023 sebesar Rp2.888.146.534.690,97 atau 97,05% dari anggaran dalam APBD-P 2023 sebesar Rp2.975.920.015.661,00. Realisasi Belanja operasi terdiri atas Belanja Pegawai Rp1.100.521.283.967,05, Belanja Barang dan Jasa Rp1.405.114.292.589,86, Belanja Bunga Rp8.623.436.793,00, Belanja Subsidi Rp4.143.883.000,00, Belanja Hibah Rp362.326.208.341,06, dan Belanja Bantuan Sosial Rp7.417.430.000,00.

2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada Tahun 2023 sebesar Rp618.877.436.638,59 atau 93,67%, dari anggaran dalam APBD-P 2023 sebesar Rp660.703.184.611,00. Realisasi belanja modal terdiri dari Belanja Modal Tanah Rp1.388.489.184,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 202.847.528.770,05, Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp232.962.878.105,59, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp178.551.126.080,95, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp529.474.380,00, dan Belanja Modal Aset Lainnya Rp2.597.940.118,00.

3. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2023 sebesar Rp2.413.029.129,00 atau 34,67% dari target anggaran dalam APBD-P 2023 sebesar Rp6.960.777.665,00.

4. Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer pada Tahun 2023 sebesar Rp767.544.449.001,00 atau sebesar 97,30% dari target anggaran dalam APBD-P tahun 2023 sebesar Rp788.868.095.864,00. Belanja transfer terdiri atas Belanja Bagi Hasil dengan realisasi sebesar Rp759.191.867.087,00; dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp8.352.581.914,00.

Kode Rek	Uraian	Target APBD-P	Realisasi	%	Lebih / (Kurang)
5	BELANJA DAERAH	4.432.452.073.801,00	4.276.981.449.459,56	96,49	(155.470.624.341,44)
5.1	BELANJA OPERASI	2.975.920.015.661,00	2.888.146.534.690,97	97,05	(87.773.480.970,03)
5.1.1	Belanja Pegawai	1.131.987.999.352,00	1.100.521.283.967,05	97,22	(31.466.715.384,95)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.439.819.111.176,00	1.405.114.292.589,86	97,59	(34.704.818.586,14)
5.1.3	Belanja Bunga	9.100.000.000,00	8.623.436.793,00	94,76	(476.563.207,00)
5.1.4	Belanja Subsidi	5.139.750.000,00	4.143.883.000,00	80,62	(995.867.000,00)
5.1.5	Belanja Hibah	381.759.531.133,00	362.326.208.341,06	94,91	(19.433.322.791,94)
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	8.113.624.000,00	7.417.430.000,00	91,42	(696.194.000,00)
5.2	BELANJA MODAL	660.703.184.611,00	618.877.436.638,59	93,67	(41.825.747.972,41)
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.550.000.000,00	1.388.489.184,00	89,58	(161.510.816,00)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	209.987.380.531,00	202.847.528.770,05	96,60	(7.139.851.760,95)

Kode Rek	Uraian	Target APBD-P	Realisasi	%	Lebih / (Kurang)
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	261.455.707.771,00	232.962.878.105,59	89,10	(28.492.829.665,41)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	184.375.202.898,00	178.551.126.080,95	96,84	(5.824.076.817,05)
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	552.134.268,00	529.474.380,00	95,90	(22.659.888,00)
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	2.782.759.143,00	2.597.940.118,00	93,36	(184.819.025,00)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.960.777.665,00	2.413.029.129,00	34,67	(4.547.748.536,00)
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	6.960.777.665,00	2.413.029.129,00	34,67	(4.547.748.536,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	788.868.095.864,00	767.544.449.001,00	97,30	(21.323.646.863,00)

Kode Rek	Uraian	Target APBD-P	Realisasi	%	Lebih / (Kurang)
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	780.468.095.864,00	759.191.867.087,00	97,27	(21.276.228.777,00)
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	8.400.000.000,00	8.352.581.914,00	99,44	(47.418.086,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(338.353.994.353,00)	(107.027.354.050,53)		231.326.640.302,47

Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 sebesar Rp404.381.542.264,49 atau sebesar 99,72% dari target dalam APBD-P Tahun 2023 sebesar Rp405.506.594.892,00. Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp388.950.302.882,49, Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp15.431.239.382,00, dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Rp37.172.817,00. Sementara itu pengeluaran pembiayaan di Provinsi Kepulauan Riau direncanakan sebesar Rp67.152.600.539,00 dengan realisasi Rp66.266.646.018,00 atau sebesar 98,68% untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo. Pembiayaan Netto direncanakan sebesar Rp338.353.994.353,00 dengan realisasi Rp338.152.069.063,49 atau sebesar 99,94%. Dengan demikian Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun berkenaan terealisasi sebesar Rp231.214.715.013,24.

Kod Rek	Uraian	Target APBD-P	Realisasi	%	Lebih / (Kurang)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	405.506.594.892,00	404.418.715.081,49	99,73	(1.087.879.810,51)
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	388.950.302.882,00	388.950.302.882,49	100,00	0,49
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	16.556.292.010,00	15.431.239.382,00	93,20	(1.125.052.628,00)
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	37.172.817,00	0,00	37.172.817,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	67.152.600.539,00	66.266.646.018,00	98,68	(885.954.521,00)
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	67.152.600.539,00	66.266.646.018,00	98,68	(885.954.521,00)
	PEMBIAYAAN NETTO	338.353.994.353,00	338.152.069.063,49	99,94	(201.925.289,51)
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	231.214.715.013,24	0,00	231.214.715.013,24



MEWUJUDKAN KEPULAUAN RIAU YANG MAKMUR, BERDAYA SAINS, DAN BERBUDAYA



25

TOP PENGHARGAAN

2023

Plt. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTDA
SETDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Plt. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTDA
SETDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Dr. ZAENAL ARIFIN

MEWUJUDKAN KEPULAUAN RIAU YANG MAKMUR, BERDAYA SAING, DAN BERBUDAYA